

PERANAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN TAJDID DI KOTA PALANGKA RAYA

Iqbal

STAIN Majene

Email: iqbal@stainmajene.ac.id

Abstract

Muhammadiyah, as a reformist movement in Indonesia, has existed since before the independence of the Republic of Indonesia. Since its establishment, Muhammadiyah has contributed significantly to the development of the Indonesian nation in various fields. As social beings, humans continually evolve over time, necessitating renewal movements to ensure that Islam remains adaptable and relevant across different eras. This dynamic nature of human life requires reformist organizations like Muhammadiyah to remain at the forefront of addressing societal challenges. To this end, Muhammadiyah has formulated two key aspects of its reform movement. The first is the purification movement, aimed at purifying the beliefs of Muslims. The second is the reform movement, which focuses on developing an understanding and implementation of Islam that aligns with scientific advancements and societal changes. In Palangka Raya, Muhammadiyah has made notable contributions in several areas, including education, religious leadership, and social services. This article employs a historical approach with descriptive and analytical methods. The sources for this article were gathered through interviews and a review of literature relevant to its title.

Keyword: Muhammadiyah; Reformist Movement

Abstrak

Muhammadiyah, sebagai gerakan pembaruan di Indonesia, telah eksis sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Sebagai makhluk sosial, manusia terus berkembang seiring waktu, sehingga diperlukan gerakan pembaruan agar Islam tetap adaptif dan relevan di berbagai zaman. Sifat dinamis kehidupan manusia menuntut organisasi pembaruan seperti Muhammadiyah untuk tetap berada di garis depan dalam menjawab tantangan masyarakat. Untuk tujuan ini, Muhammadiyah telah merumuskan dua aspek utama dalam gerakan pembaruannya. Pertama adalah gerakan pemurnian, yang bertujuan untuk memurnikan keyakinan umat Muslim. Kedua adalah gerakan pembaruan, yang berfokus pada pengembangan pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan dalam masyarakat. Di Palangka Raya, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi penting di beberapa bidang, termasuk pendidikan, kepemimpinan agama, dan layanan sosial. Artikel ini menggunakan pendekatan historis dengan metode deskriptif dan analitis. Sumber-sumber untuk artikel ini dikumpulkan melalui wawancara dan tinjauan literatur yang relevan dengan judul artikel.

Kata Kunci: Gerakan Pembaruan; Muhammadiyah

Pendahuluan

Muhammadiyah lahir pada awal abad ke-20 di Indonesia, dengan pengaruh kuat dari gerakan pembaruan Islam yang berkembang di luar negeri, terutama di Timur Tengah. Gerakan ini menjadi bagian dari rangkaian kebangkitan Islam di Asia, yang jejaknya dapat ditelusuri sejak era Ibnu Taimiyah (1263-1338)¹ dan Muhammad Bin Abd al-Wahhab (1703-1787).²

Kelompok yang menentang pemikiran dan dakwah Muhammad Bin Abd al-Wahhab dalam memurnikan akidah Islam menyebut ajarannya sebagai Wahabisme, yaitu aliran pemikiran yang dikaitkan dengan nama Muhammad Bin Abd al-Wahhab. Belakangan, Wahabisme lebih dikenal sebagai gerakan Puritanisme. Selain Ibnu Taimiyah dan Muhammad Bin Abd al-Wahhab, tokoh-tokoh lain yang berperan dalam gerakan pembaruan ini adalah Jamaluddin al-Afghani (1838-1897)³ dan Muhammad Abduh (1849-1905).⁴

Hadirnya organisasi keagamaan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dianggap sebagai langkah maju yang signifikan bagi umat Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, melihat perlunya meluruskan tradisi keagamaan yang cenderung sinkretis, kehidupan akidah dan amaliah Islam yang telah kehilangan kejernihannya, serta pandangan umat Islam yang masih statis terhadap ajaran dan praktik Islam murni. Melalui tajdid, Ahmad Dahlan berupaya mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang, menurutnya, telah banyak disalahpahami oleh umat Islam sendiri.⁵

Secara etimologis, nama Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab "Muhammad," yang merujuk pada Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, ditambah dengan "ya nasabiyah" yang berfungsi menjeniskan. Muhammadiyah

¹Firdaus AN., *Taqiyuddin Ibnu Taimiyah: Pokok-Pokok Pedoman Islam Dan Bernegara* (Bandung: Depongoro, 1967), 9.

²Syamsul Arifin, *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental* (Malang: UMM Press, 2005), 15-88.

³Oemar Amin Hussein, *Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), 12.

⁴Mahsun Jayady, *Muhammadiyah Purifikasi Aqidah Dan Strategi Perjuangannya*. (Surabaya: LP- AIK Univ. Muhammadiyah Surabaya, 1997), 3.

⁵Yusron Asyofi, *KH. Ahmad Dahlan, Pemikiran Dan Kepemimpinannya* (Yogyakarta: Ofset Yogyakarta, 1995), 25.

berarti umat Muhammad saw. atau para pengikut Nabi Muhammad. Setiap Muslim yang meyakini dan mengakui bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan Allah swt. yang terakhir, pada dasarnya termasuk dalam kategori Muhammadiyah. Dengan demikian, siapa pun yang beragama Islam adalah bagian dari Muhammadiyah, tanpa memandang perbedaan organisasi, golongan, bangsa, wilayah geografis, etnis, atau lainnya.⁶

Secara terminologi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berfokus pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 M di Yogyakarta, dengan dasar Islam yang bersumber pada Alquran dan al-Sunah. Nama Muhammadiyah dipilih dengan harapan baik (bertafa'ul), sekaligus untuk meneladani dan mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad saw. Segala upaya Muhammadiyah diarahkan untuk mewujudkan kejayaan Islam sebagai cita-cita ideal serta menciptakan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas.⁷

Pembentukan Muhammadiyah, jika ditinjau dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya, secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, faktor subyektif,⁸ yaitu kesungguhan Ahmad Dahlan⁹ dalam mendalami, membahas,¹⁰ dan mengkaji kandungan Alquran. Ahmad Dahlan dengan tekun melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabur, yaitu merenungkan dan mencermati dengan penuh ketelitian setiap makna yang tersirat dalam ayat-ayat Alquran.

Faktor subjektif yang sangat dominan, bahkan dapat dianggap sebagai faktor utama dan penentu dalam pendirian Muhammadiyah, adalah hasil

⁶Deddy Setia, *Gerakan Dakwah Purifikasi Muhammadiyah* (Jakarta: Jtpt IAIN, 2004), 43.

⁷Mustofa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhamadiyah Sebagai Gerakan Islam Dalam Perspektif Historis Dan Idiologis* (Yogyakarta: LPPI, 2000), 70-71.

⁸Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), 112-13.

⁹Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh, Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 14.

¹⁰TPA dan Kemuhammadiyah, *Muhamadiyah Sejarah, Pemikiran Dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1990), 68-70.

pendalaman KH. Ahmad Dahlan terhadap Alquran. Hal ini terlihat dari kecintaannya dalam membaca, serta ketekunannya dalam menelaah, membahas, dan mengkaji kandungan Alquran secara mendalam.

Kedua, faktor objektif. Faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada penyebab yang muncul di tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia, sementara faktor eksternal mencakup penyebab yang berasal dari luar masyarakat Indonesia. Faktor objektif yang bersifat internal disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Amalan Islam yang kehilangan kemurniannya disebabkan oleh kenyataan bahwa Alquran dan al-Sunah tidak sepenuhnya dijadikan sebagai rujukan utama oleh sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang didahului oleh pengaruh berbagai aliran dan agama lain, seperti Hindu dan Buddha. Akibatnya, ajaran-ajaran dari agama-agama tersebut sering kali secara tidak disengaja melekat pada ajaran Islam.¹¹ Melihat kondisi tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam praktiknya umat Islam di Indonesia pada masa itu sering menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam kehidupan beraqidah, Islam mengajarkan tauhid yang murni, bebas dari berbagai bentuk syirik, bid'ah, dan khurafat. Namun, dalam praktiknya, banyak umat Islam yang mempercayai benda-benda keramat, melakukan sesajian, meminta berkah di kuburan, mempercayai ramalan dukun, astrologi, serta menjalankan berbagai ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam hal doa, sebagian umat Islam menggunakan perantara (washilah) untuk mendekati diri kepada Allah swt., seperti bertawasul kepada Syaikh Abdul Qadir Jaelani, Nabi, Malaikat, Wali, dan lainnya.¹² Padahal, hal tersebut tidak diajarkan dalam ajaran Islam.

¹¹Setia, *Gerakan Dakwah Purifikasi Muhammadiyah*, 45.

¹²Setia, *Gerakan Dakwah Purifikasi Muhammadiyah*, 45.

2. Lembaga pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam belum sepenuhnya mampu mempersiapkan generasi yang siap menjalankan tugas sebagai “Khalifah Allah di muka bumi.” Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan khas milik umat Islam Indonesia, juga merupakan sistem pendidikan unik yang berkembang di Indonesia. Namun, dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman yang terus berkembang, kurikulum dan isi pendidikan di pondok pesantren saat itu dirasakan kurang memadai untuk mengantisipasi perubahan dan kebutuhan zaman.

Menurut Syaiful Bakhri, K.H. Ahmad Dahlan merumuskan gerakan pembaharuannya dalam dua konsep utama, yaitu “Purifikasi dan Dinamisasi.” Purifikasi didasarkan pada keyakinan bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh kurangnya pengembangan akidah Islam yang benar, sehingga diperlukan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah. Prinsip utama dari purifikasi ini adalah bahwa segala sesuatu hanya diyakini dan dilaksanakan apabila terdapat perintah dalam Alquran dan Hadis. Sementara itu, dinamisasi diterapkan dalam bidang muamalah dengan mendorong modernisasi, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Alquran dan Hadis. Prinsip dinamisasi ini berpegang pada doktrin bahwa segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak ada larangan dalam Alquran dan Hadis.¹³

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah telah berhasil melakukan berbagai terobosan melalui amal usaha yang bertujuan untuk mencerahkan kehidupan umat dan bangsa Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Islam. Selain itu, Muhammadiyah juga memposisikan dirinya sebagai organisasi keagamaan dengan misi dakwah Islam melalui amar makruf nahi munkar. Untuk memperkuat posisinya, Muhammadiyah merumuskan Lima Pilar utama, yaitu:¹⁴

1. Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi akidah Islam,
2. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid,
3. Muhammadiyah sebagai gerakan mobilisasi amal saleh,

¹³Syaiful Bakhri, “Menuju Revitalisasi Dan Transformasi Gerakan Pencerahan Muhammadiyah,” n.d., 2.

¹⁴Amin Rais, *Moralitas Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Dinamika, 1995), 28–49.

4. Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan (al-Tarbiyah), dan
5. Muhammadiyah sebagai gerakan yang tidak berorientasi pada politik praktis.

Salah satu poin penting dari khittah Muhammadiyah, yang sekaligus menjadi ciri khasnya sejak awal berdiri hingga saat ini, adalah perannya sebagai gerakan tajdid. Konsep tajdid ini perlu dipahami baik dalam khazanah Islam secara umum maupun dalam perspektif Muhammadiyah. Secara lughawi (bahasa), tajdid berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdidan*, yang berarti memperbarui atau menjadikan sesuatu baru.¹⁵ Adapun konteks pembaruan yang dimaksud berfokus pada aspek pemahaman keagamaan.

Yusuf Qardawi mendefinisikan *tajdid* sebagai pembaruan atau modernisasi, yaitu upaya mengembalikan pemahaman agama kepada kondisi aslinya seperti pada masa Nabi. Namun, ini tidak berarti bahwa hukum agama harus diterapkan persis seperti pada masa itu. Sebaliknya, *tajdid* bertujuan untuk melahirkan keputusan hukum yang relevan dengan masa kini, tetap sejalan dengan maksud syar'i, sekaligus membersihkannya dari unsur-unsur bid'ah, khurafat, dan pengaruh pemikiran asing.¹⁶

Dengan rumusan tajdid seperti itu, dapat dipahami bahwa tajdid secara umum berarti pembaruan atau modernisasi. Dalam pengertian masyarakat Barat, modernisasi mengacu pada pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah pandangan, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, agar semuanya dapat menyesuaikan diri dengan ide-ide dan kondisi baru yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan modern. Pemikiran dan aliran modernisasi ini muncul pada periode yang dikenal sebagai *age of reason* atau *enlightenment* (masa akal atau pencerahan), yang berlangsung sekitar tahun 1750-1800.¹⁷ Paham ini memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Barat dan segera merambah ke bidang agama, yang dianggap sebagai penghambat kemajuan. Akibatnya, modernisasi dalam kehidupan keagamaan di Barat bertujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu

¹⁵Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Ala'lām* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 81.

¹⁶Yusuf Qardawi, *Dasar-Dasar Hukum Islam (Taqlid Dan Ijtihad)*, n.d., 96.

¹⁷Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI-Press, 1978), 94.

pengetahuan serta filsafat modern. Pada akhirnya, pandangan ini melahirkan sekularisme sebagai karakteristik kehidupan di Barat.¹⁸

Perjalanan dakwah Muhammadiyah sejak tahun 1912 M. (pasca Ahmad Dahlan) hingga saat ini telah melewati dua belas kali pergantian kepemimpinan. Dalam perkembangan era modern, Muhammadiyah terus memperluas jangkauannya hingga ke pelosok negeri. Langkah ini dilakukan untuk merealisasikan misi amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan tajdid juga menjadi bagian penting dari upaya Muhammadiyah dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Gerakan ini diwujudkan melalui berbagai dakwah serta amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan historis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lalu.¹⁹ Nugroho Notosusanto menjelaskan bahwa pendekatan historis adalah kumpulan prinsip-prinsip atau aturan yang sistematis, yang dirancang untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan untuk penulisan sejarah, menilai secara kritis, dan menyajikan sintesis dalam bentuk tulisan.²⁰ Langkah-langkah yang dilakukan dalam pendekatan historis dimulai dengan pengumpulan sumber-sumber sejarah atau Heuristik, di mana unsur dokumen menjadi sangat penting. Dokumen berfungsi untuk menyajikan data yang diperlukan guna memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang ada. Sumber tertulis yang diperoleh, seperti dokumen sezaman, buku, majalah, dan surat kabar, turut memperkaya informasi dalam penelitian ini. Dokumen yang dikumpulkan terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Sumber dokumen yang berupa arsip diperoleh dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, dan khususnya dari Pimpinan Daerah

¹⁸Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, 95.

¹⁹Dudung Abdul al-Rahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 54.

²⁰Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), 1.

Muhammadiyah Palangka Raya. Selain menggunakan sumber dokumen, penulisan artikel ini juga mengaplikasikan teknik wawancara, yang dilakukan untuk memperkuat data melalui keterangan secara lisan dari narasumber.²¹ Hasil wawancara juga digunakan untuk membandingkan dengan buku-buku yang sudah ada, sehingga data yang diperoleh dapat menjadi lebih objektif. Wawancara dilakukan dengan tokoh atau informan yang memiliki pengetahuan terkait peristiwa atau tema yang sedang diteliti. Dalam tulisan ini, agar tidak menyimpang dari sasaran tema, penulisan berfokus pada peran penting Muhammadiyah dalam melakukan pembaharuan.

Semua data yang telah dikumpulkan kemudian dikritik dengan sumber-sumber yang ada. Proses ini bertujuan untuk menentukan otentisitas sumber data, yaitu melalui kritik eksternal untuk mencari keaslian sumber-sumber yang ada dan menentukan kredibilitas isi informasi yang disampaikan oleh sumber melalui kritik internal. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara sumber primer berupa arsip, wawancara, dan buku-buku yang relevan dengan tulisan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis. Proses ini sangat penting dalam penelitian untuk memastikan hasil penelitian menarik dan mudah dipahami oleh semua pihak.

Pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode komparatif, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data hasil observasi, kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang terdapat dalam buku-buku literatur yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang diharapkan sesuai dengan tema penulisan. Langkah analisis yang diambil adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu fenomena beserta ciri-ciri khusus dan umum yang ada di dalamnya, jika data-data yang diperoleh berupa kasus-kasus, serta menekankan pada aspek kualitas.²² Penulis berusaha melakukan penafsiran

²¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), 129.

²²Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), 267-269.

terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari data-data yang sudah diseleksi, dengan disesuaikan pada tema yang dibahas, yaitu menghubungkan sumber yang diperoleh dengan fakta yang ada. Langkah terakhir adalah menyusun tulisan historiografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik penyelidikan yang berfokus pada penguraian dan penjelasan terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi melalui sumber dokumen.²³ Dokumentasi dilakukan dengan cara menangkap dan mencatat berbagai sumber, baik yang berupa sumber tertulis maupun sumber lisan, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai topik yang sedang diteliti.

Setelah semua proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dilaksanakan serta semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dengan cara menata dan mengorganisirnya secara sistematis untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang diteliti.

Pembahasan

Kota Palangka Raya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 2.400 km² dan jumlah penduduk sebanyak 376.647 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 92.067 jiwa per km² (berdasarkan Sensus 2015). Sebelum adanya otonomi daerah pada tahun 2001, kota ini hanya terdiri dari dua kecamatan, yaitu Pahandut dan Bukit Batu. Namun, setelah pembentukan otonomi daerah, kini Kota Palangka Raya terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau, dan Rakumpit.²⁴ Kota Palangka Raya mulai dibangun pada tahun 1957 berdasarkan UU Darurat No. 10/1957, yang menetapkan pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Kota ini dibangun di atas hutan belantara, dengan Desa Pahandut yang terletak di tepi Sungai Kahayan sebagai titik awal pembangunan. Sebagian besar wilayah Palangka Raya masih berupa hutan, termasuk Hutan

²³Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode, Dasar, Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), 135.

²⁴"Kota Palangka Raya," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 25, 2018, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Palangka_Raya&oldid=14135997.

Lindung Tangkiling dan kawasan konservasi alam. Pada awal pembangunannya, Presiden Soekarno merencanakan Palangka Raya sebagai ibu kota negara di masa depan untuk menggantikan Jakarta. Dengan luas wilayah yang mencapai 2.400 km², Palangka Raya menjadi kota dengan wilayah terluas di Indonesia, sekitar 3,6 kali luas Jakarta.²⁵ Berdasarkan *Staatsblad van Nederlandisch Indië* tahun 1849, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palangka Raya merupakan bagian dari "Zuid-Ooster-Afdeeling" di Kalimantan, menurut keputusan Menteri Negara dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 27 Agustus 1849 (No. 8). Provinsi Kalimantan Tengah sendiri terbentuk melalui proses panjang dan mencapai puncaknya pada 23 Mei 1957, yang juga dijadikan sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Pembentukan provinsi ini dikukuhkan dengan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1957, yang menjadikannya daerah otonom pertama di Kalimantan.²⁶

Berdasarkan sensus penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2010, umat Islam di Kota Palangka Raya berjumlah sekitar 153.892 orang.²⁷ Umat Islam di kota ini terbagi menjadi dua kelompok ormas utama, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Meskipun kedua ormas ini memiliki perbedaan pemahaman keagamaan, hubungan mereka secara organisatoris tidak menimbulkan masalah yang berarti. Namun, dalam dataran massa, perbedaan pandangan keagamaan seringkali menjadi penghalang dalam hubungan antar anggota atau simpatisan masing-masing ormas. Fenomena perbedaan ini tercermin dalam istilah "kelompok tua" yang cenderung memegang tradisi, dan "kelompok muda" yang lebih mendekati pandangan purifikasi dalam beragama. Walaupun terdapat perbedaan pandangan ini, hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka antar kelompok, berkat peran tokoh agama yang mendorong terciptanya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah melalui

²⁵"Kota Palangka Raya," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 25, 2018, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Palangka_Raya&oldid=14135997.

²⁶"Kota Palangka Raya," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 25, 2018, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Palangka_Raya&oldid=14135997.

²⁷"Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Kumpulan Logo Lambang Indonesia*, accessed September 10, 2018, http://ardilamadi.blogspot.com/2013/07/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di_7115.html.

Kementerian Agama di Kota Palangka Raya juga memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan antar kelompok, salah satunya dengan mengatur jadwal khatib secara silang antara NU dan Muhammadiyah. Program ini membantu mempererat hubungan sosial antara komunitas NU dan Muhammadiyah, serta semakin mendekatkan mereka dalam berinteraksi dalam ranah keagamaan.²⁸

Eksistensi umat Islam di Kota Palangka Raya sangat terlihat dalam berbagai kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan, salah satunya adalah pawai takbir yang diadakan saat perayaan hari raya besar umat Islam. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di Bundaran Besar Kota Palangka Raya, menjadi salah satu bentuk ekspresi kebersamaan umat Islam dalam merayakan hari raya. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kota Palangka Raya turut berperan penting dalam membina dan mengembangkan generasi muda umat Islam. Di Palangka Raya, terdapat dua perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan agama Islam, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP). Universitas Muhammadiyah Palangka Raya menjadi salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam pembinaan umat Islam, sementara IAIN Palangka Raya, yang sebelumnya dikenal dengan nama STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), juga memainkan peran penting dalam mencetak generasi Islam yang unggul di berbagai bidang, baik agama maupun non-agama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah umat Islam di Kota Palangka Raya pada tahun 2016 mencapai 221.972 jiwa,²⁹ yang berarti lebih dari setengah populasi masyarakat Kota Palangka Raya memeluk agama Islam. Meskipun umat Islam merupakan mayoritas, kerukunan antar umat beragama tetap terjalin dengan

²⁸Joko Haryanto, "Dinamika Kerukunan Intern Umat Islam Dalam Relasi Etnisitas Dan Agama Di Kalteng," *Analisa* 20 (June 30, 2013): 19, doi:10.18784/analisa.v20i1.2.

²⁹"Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah," accessed September 13, 2018, <https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/11/01/592/jumlah-pemeluk-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2016.html>.

harmonis tanpa adanya konflik keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan keharmonisan antar umat beragama.

Pembangunan Kota Palangka Raya dimulai dengan peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Tugu ini memiliki makna yang mendalam terkait dengan simbol-simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan Indonesia, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Angka 17** melambangkan hikmah dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Angka ini menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan.
- b. **Tugu Api** menggambarkan semangat yang tidak pernah padam, seperti api yang selalu menyala. Ini mencerminkan semangat kemerdekaan dan tekad untuk terus membangun negara Indonesia, termasuk dalam membangun Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi.
- c. **Pilar yang berjumlah 17** menggambarkan jumlah senjata yang siap digunakan untuk berperang, yang melambangkan tekad dan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengembangkan daerah.
- d. **Segi Lima Bentuk Tugu** melambangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan makna khusus pada sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menjadi landasan bagi kehidupan beragama dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, nama ibu kota provinsi yang sebelumnya dikenal sebagai Pahandut diubah menjadi Palangka Raya. Sejarah terbentuknya pemerintahan Kota Palangka Raya tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, yang didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957. Undang-undang tersebut, yang tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 53 beserta penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284), mulai berlaku pada tanggal 23 Mei

³⁰"Kota Palangka Raya."

1957 dan kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang mengatur pembagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lima kabupaten dengan Palangka Raya sebagai ibu kotanya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 22 Desember 1959 Nomor Des. 52/12/2-206, diputuskan bahwa lokasi dan pusat pemerintahan Daerah Kalimantan Tengah dipindahkan dari Banjarmasin ke Palangka Raya, berlaku mulai 20 Desember 1959.³²

Kecamatan Kahayan Tengah, yang awalnya berpusat di Pahandut, secara bertahap mengalami perubahan dengan menerima tambahan tugas dan fungsi, salah satunya adalah mempersiapkan pembentukan Kotapraja Palangka Raya. Pada masa itu, Kecamatan Kahayan Tengah dipimpin oleh Asisten Wedana, J.M. Nahan. Perubahan tersebut semakin signifikan setelah Bapak Tjilik Riwut dilantik sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, di mana pusat Kecamatan Kahayan Tengah dipindahkan dari Pahandut ke Bukit Rawi. Pada 11 Mei 1960, dibentuk Kecamatan Palangka Khusus untuk mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya, yang juga dipimpin oleh J.M. Nahan. Kemudian, mulai 20 Juni 1962, kepemimpinan Kecamatan Palangka Khusus dialihkan kepada W. Coenrad, yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.³³

Berbagai perubahan, peningkatan, dan pembentukan dilakukan untuk melengkapi struktur Kotapraja Administratif Palangka Raya, dengan mendirikan tiga kecamatan berikut:

- a. Kecamatan Palangka yang berpusat di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu yang berpusat di Tangkiling.

³¹“Kota Palangka Raya.”

³²“Kota Palangka Raya.”

³³“Kota Palangka Raya.”

- c. Kecamatan Petuk Katimpun yang berpusat di Marang Ngandurung Langit.³⁴

Pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka yang berpusat di Pahandut dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut yang tetap berpusat di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka yang berpusat di Palangka Raya.³⁵

Dengan keberadaan empat kecamatan dan 17 kampung, Kotapraja Administratif Palangka Raya telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi sebuah Kotapraja otonom. Hal ini diperkuat oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965) pada 12 Juni 1965, yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya sebagai Kotapraja otonom. Peresmian status otonomi Kotapraja Palangka Raya dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Komisi B DPRGR L.S. Handoko Widjojo, para anggota DPRGR, pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jenderal TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, perwakilan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, dan beberapa pejabat tinggi lainnya dari Kalimantan. Acara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang, halaman Balai Kota. Sebagai bagian dari sejarah yang tak terlupakan, sebelum peresmian dimulai pukul 08.00 pagi, dilakukan demonstrasi penerjunan payung yang membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi ini dipimpin oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung, terdiri atas 14 penerjun di bawah pimpinan Letnan Udara II M. Dahlan, seorang mantan pasukan paratroop AURI yang pernah bertugas di Kalimantan pada 17 Oktober 1947. Para penerjun menggunakan pesawat T-568 Garuda Oil, yang dipimpin oleh Kapten Pilot Arifin, dengan Copilot Rusli dan empat awak pesawat lainnya. Demonstrasi ini juga diikuti oleh undangan khusus, Kapten Udara F.M. Soejoto (mantan paratroop 17 Oktober 1947), serta 10 sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta.³⁶

³⁴“Kota Palangka Raya.”

³⁵“Kota Palangka Raya.”

³⁶ “Kota Palangka Raya.”

Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dalam parade jalan kaki oleh para penerjun payung menuju lapangan upacara. Pada hari tersebut, melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Bapak Tjilik Riwut, ditunjuk sebagai penguasa Kotapraja Palangka Raya dan menerima lambang Kotapraja Palangka Raya dari Menteri Dalam Negeri. Dalam upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya pada 17 Juni 1965, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, yang juga Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas seberat 170 gram kepada Menteri Dalam Negeri untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Acara dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.³⁷

Penduduk Palangka Raya terdiri dari berbagai suku bangsa yang membawa kebudayaan masing-masing. Suku-suku yang ada antara lain Dayak, Banjar, Manura, Jawa, Sunda, Bali, Batak, Padang, Ambon, Makassar, Bima, Manado, dan Cina. Perbedaan antara yang kaya dan miskin tidak begitu mencolok, banyak orang yang terlihat miskin, namun dengan usaha yang gigih, mereka mampu memperbaiki kondisi mereka, seperti dengan menjadi pedagang, pengusaha, atau pemborong. Dari seluruh penduduk Palangka Raya, sekitar 47,22% berusia 15 tahun ke atas, yang merupakan usia produktif secara ekonomi. Sebagian besar penduduk (28,98%) bekerja di sektor perdagangan, sementara sektor dengan penyerap tenaga kerja terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air, yang hanya menyerap 0,72% dari tenaga kerja. Tingkat pendidikan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja masih relatif rendah, yang terlihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja. Berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar, tidak ada ketimpangan yang mencolok antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Setiap tahunnya, rata-rata hanya sekitar 22,16% dari total pencari kerja terdaftar yang mendapatkan

³⁷“Kota Palangka Raya.”

pekerjaan, sementara sisanya, sekitar 77,84%, masih belum memperoleh kesempatan untuk bekerja.³⁸

Dari segi budaya, masyarakat Palangka Raya terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti suku Dayak, Banjar, Madura, Jawa, Sunda, Bali, Batak, Padang, Ambon, Makassar, Bima, Manado, dan Cina. Keberagaman suku bangsa ini berkontribusi pada keragaman budaya yang ada di Palangka Raya. Dampaknya juga terlihat dalam keragaman seni yang dimiliki oleh masyarakat, mulai dari seni suara (nyanyian), seni ukir, seni lukis, hingga seni tari.³⁹

Selain itu, masyarakat Palangka Raya masih memegang teguh beberapa upacara adat, salah satunya adalah upacara adat Tiwah. Upacara ini merupakan ritual keagamaan bagi masyarakat yang menganut agama Hindu Kaharingan, yang dianggap sebagai agama tertua di Kalimantan. Upacara Tiwah diyakini sebagai prosesi untuk mengantar roh leluhur atau kerabat yang telah meninggal dunia menuju alam baka, dengan cara memindahkan sisa-sisa jasad, seperti tulang belulang, dari kubur ke tempat yang disebut Sandung. Ritual ini juga dilengkapi dengan persembahan hewan, biasanya berupa kerbau, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya cukup tinggi. Masyarakat Dayak di Palangka Raya juga menggunakan nyanyian-nyanyian dalam berbagai aktivitas, baik dalam upacara adat maupun kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh nyanyian tersebut antara lain Natum, yang menceritakan sejarah masa lalu (tetek tatum), Natum Pangpanggal, yang merupakan nyanyian ratapan atas kematian anggota keluarga, Dongdong, yang dinyanyikan saat menanam padi, Dodot, yang digunakan saat berkayuh di perahu atau rakit, Marung, yang dinyanyikan pada saat pesta besar, Ngandan, yang dinyanyikan orang tua saat menimang anak-anak, Jaya, yang dinyanyikan oleh dukun saat mengobati orang sakit, dan Baratabe, yang digunakan untuk menyambut kedatangan tamu, serta masih banyak nyanyian lainnya.⁴⁰

³⁸Aulia Rizki Bustamal, "Pengaruh Perkembangan Kota Palangka Raya Terhadap Kawasan Tepi Sungai Kahayan" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 92-93.

³⁹Aulia Rizki Bustamal, "Pengaruh Perkembangan Kota Palangka Raya Terhadap Kawasan Tepi Sungai, 95.

⁴⁰Aulia Rizki Bustamal, "Pengaruh Perkembangan Kota Palangka Raya Terhadap Kawasan Tepi Sungai, 96.

Secara umum, umat Islam di Kota Palangka Raya tidak hanya berasal dari para transmigran dari luar kota, tetapi juga dari suku asli Kalimantan yang dikenal dengan nama Suku Dayak Bakumpai. Secara etimologis, Bakumpai merujuk pada sekelompok suku Dayak yang mendiami wilayah aliran Sungai Barito. Kata "Bakumpai" berasal dari bahasa Banjar, di mana "ba" berarti memiliki, dan "kumpai" berarti rumput, yang menggambarkan bahwa suku ini tinggal di daerah yang banyak terdapat rumput. Menurut legenda, asal-usul Suku Dayak Bakumpai berasal dari Suku Dayak Ngaju yang kemudian melakukan migrasi ke daerah yang kini dikenal dengan nama Marabahan.⁴¹

Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid di Kota Palangka Raya bergerak dalam berbagai bidang :

1. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN)

Menurut peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/1.0/B/2012 Pasal 1 Ayat (3), Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan unsur pembantu pimpinan persyarikatan yang bertugas dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.⁴² Peran dan fungsi Majelis Dikdasmen dalam melaksanakan amal usaha, program, dan kegiatan di bidang pendidikan dasar dan menengah mencakup:⁴³

1. Pembinaan ideologi Muhammadiyah di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren;
2. Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengoordinasian, serta pengawasan terhadap pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas amal usaha, program, dan kegiatan;
4. Pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha, program, dan kegiatan;
5. Pengembangan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren;

⁴¹"Suku Dayak Bakumpai," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, February 13, 2017, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Dayak_Bakumpai&oldid=12500355.

⁴²Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/1.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Bab I Pasal 1 Ayat 3.," n.d.

⁴³Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/1.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Bab I Pasal 1 Ayat 3.," n.d.

6. Penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
7. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Majelis ini dibentuk sejak masa KH. Ahmad Dahlan, awalnya bersama dengan urusan sekolah "Qismu Argo", yang kemudian berkembang menjadi Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat Muhammadiyah. Majelis ini berfokus pada kemajuan sarana pendidikan, administrasi, pembangunan, dan manajemen kurikulum. Tujuan utama dari majelis ini adalah:

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengajaran;
2. Menjadi sarana dakwah kepada masyarakat luas;
3. Menyelenggarakan sekolah-sekolah percontohan atau teladan;
4. Mencetak generasi yang lebih baik dan memiliki jiwa Muhammadiyah;
5. Menyeimbangkan antara ilmu umum dan ilmu agama.⁴⁴

Sejak terbentuknya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya, peranannya dalam bidang pendidikan di kota ini dapat dilihat melalui pembangunan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Palangka Raya. Salah satu amal usaha yang berada di bawah wewenang Pimpinan Daerah adalah SMA II Muhammadiyah Palangka Raya yang terletak di Kalampangan. Sejak didirikan pada tahun 1998,⁴⁵ SMA Muhammadiyah 2 Palangka Raya telah mendidik dan menghasilkan generasi-generasi Muslim yang unggul, baik dalam bidang agama maupun ilmu umum. Selain itu, terdapat pula MTs Muhammadiyah Palangka Raya, namun sekolah ini tutup pada tahun 1999 karena tidak memiliki gedung yang permanen.⁴⁶ Pada tahun 2018, di bawah pimpinan Drs. Sofyan Sori,

⁴⁴Dian Indriyani, "Optimalisasi Fungsi Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Muhammadiyah Di Sekolah/Madrasah (Studi Kasus Di Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Selogiri Tahun 2014)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 10.

⁴⁵Diposting oleh sma muhammadiyah 2 palangkaraya di kalampangan, "SMA MUHAMMADIYAH 2 PALANGKARAYA," accessed September 16, 2018, <http://smam2palangkaraya.blogspot.com/>.

⁴⁶Sugiatno, Amal Usaha Muhammadiyah, September 16, 2018.

M.Ag., Muhammadiyah mulai merintis sekolah baru yang dinamakan MBS (Muhammadiyah Boarding School). MBS ini mirip dengan pondok pesantren, dan gedungnya dibangun di Jalan G. Obos Induk. Hal ini dilakukan sesuai dengan keputusan Mukhtamar ke-47 di Makassar yang menyatakan bahwa setiap wilayah harus memiliki pondok pesantren Muhammadiyah. Tanah untuk pembangunan MBS ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Ciri khas dari MBS adalah selain mempelajari pelajaran umum, siswa juga diajarkan pelajaran agama Islam dan Tahfidz al-Quran. Hingga kini, pembangunan MBS masih terus berlanjut dengan dana yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk dermawan dan pengurus Muhammadiyah di tingkat cabang hingga pusat. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Pimpinan Pusat, Bapak Drs. H.A. Dahlan Rais, M.Hum., pada bulan Juli 2018. Untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah membentuk lembaga yang disebut LP2-PDM (Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Palangka Raya yang diketuai oleh Drs. H. Djuanda, M.Pd.⁴⁷

2. Majelis Tabligh

Majelis ini berfungsi untuk merancang program dan melancarkan kegiatan tabligh atau dakwah di berbagai tingkat. Majelis ini memberikan petunjuk, arahan, dan pembinaan kepada umat Islam dalam merayakan hari-hari besar Islam dan nasional, serta memberikan panduan praktis dalam acara seperti khitanan, perkawinan, kematian, dan kelahiran. Sejak berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya, kegiatan Majelis Tabligh selalu berkaitan dengan kegiatan keagamaan, seperti peringatan hari-hari besar Islam, perayaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta mengorganisir para muballigh untuk menyampaikan dakwah di masjid-masjid, baik yang dikelola oleh Muhammadiyah maupun yang menjadi binaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya. Salah satu masjid yang menjadi amal usaha Muhammadiyah adalah Masjid Mujahidin yang terletak di Jalan Rasak No. 19, Panarung, Palangka Raya. Masjid ini hingga kini tetap konsisten dalam

⁴⁷Djuanda, Kepengurusan Muhammadiyah era 1990-an, September 13, 2018.

membina umat melalui pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh pengurus masjid atas arahan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya.⁴⁸

3. Majelis Pendidikan Kader

Majelis Pendidikan Kader merupakan kelanjutan dari Badan Pendidikan Kader (1990) dan Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani (2000). Visi dari majelis ini adalah untuk menyusun manajemen dan jaringan yang terorganisir dengan baik, sehingga mampu menjadi badan pembantu pimpinan yang maju, profesional, dan modern, serta untuk meletakkan dasar yang kuat bagi peningkatan kualitas majelis dan perkaderan. Rencana strategi bidang kaderisasi adalah membangun kekuatan dan kualitas pelaku gerakan, serta memperkuat peran dan ideologi gerakan Muhammadiyah melalui sistem kaderisasi yang menyeluruh dan berorientasi ke masa depan.⁴⁹ Sistem pengkaderan Muhammadiyah dikenal dengan nama Baitul Arqam, yang berasal dari kata "bait" (rumah) dan "arqam," diambil dari Arqam bin Abil Arqam, seorang pemuda yang merupakan salah satu orang pertama yang masuk Islam pada zaman Rasulullah. Arqam berasal dari Bani Mahzum, kelompok yang merupakan musuh dari Bani Hasyim. Nabi Muhammad SAW merekrut Arqam untuk dikader, yang kemudian menjadi tempat Rasulullah membina para sahabat pada masa awal perjuangan Islam. Dari sini, Muhammadiyah menginspirasi proses pengkaderannya dan menciptakan wadah pengkaderan yang dinamakan Baitul Arqam.⁵⁰ Pelaksanaan Baitul Arqam di Muhammadiyah Palangka Raya sudah dilaksanakan pada masa periode Drs. Sofyan Sori, M.Ag. (2015-2020), yang terakhir kali pada tanggal 4-5 Maret 2017 di Aula Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Acara ini dihadiri oleh utusan-utusan ortom Muhammadiyah seperti IPM, IMM, Nasyiyatul Aisyiyah, Pemuda

⁴⁸Iqbal, Dakwah Muhammadiyah Palangka Raya, September 20, 2018.

⁴⁹"Pengertian, Fungsi, Tugas Dan Tujuan Majelis-Majelis Serta Amal Usaha Di Dalam Muhammadiyah," *Pengertian, Fungsi, Tugas Dan Tujuan Majelis-Majelis Serta Amal Usaha Di Dalam Muhammadiyah*, accessed September 16, 2018, <http://anakusniati.blogspot.com/2017/03/pengertian-fungsi-tugas-dan-tujuan.html>.

⁵⁰"Ini Asal Muasal Baitul Arqam Dalam Pengkaderan Muhammadiyah | Pwmu.Co," accessed September 16, 2018, <https://pwmu.co/10751/06/20/ini-asal-muasal-baitul-arqam-dalam-pengkaderan-muhammadiyah/>.

Muhammadiyah, serta perwakilan dari amal usaha Muhammadiyah yang berada di bawah wewenang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya. Meskipun Baitul Arqam telah dilaksanakan, tindak lanjut dari kegiatan ini belum berjalan dengan baik, karena terbatasnya waktu dan jumlah personel Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya yang aktif dalam setiap kegiatan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya periode 2015-2020 cenderung lamban dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di tingkat Kota/Daerah. Meskipun demikian, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya tetap berusaha untuk bangkit dan melaksanakan program kerja yang telah dirumuskan dalam Musyda ke-VII di Aula Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah.

4. Majelis Pelayanan Sosial

Di bidang sosial, Muhammadiyah telah memulai berbagai usaha, termasuk pendirian rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu, yang dikelola melalui lembaga-lembaga, bukan secara pribadi. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga berperan dalam menangani masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan bidang sosial, seperti prosedur penerimaan dan pembagian zakat yang sepenuhnya ditangani oleh badan amil yang berwenang. Usaha pembaruan di bidang sosial kemasyarakatan ini menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk saling membantu dan tolong-menolong antar sesama umat beragama.⁵¹

Dalam majelis ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya mengelola dua lembaga sosial, yaitu MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) yang juga dikenal sebagai LPB-PDM (Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Palangka Raya dan LazisMu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah).

LazisMu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya secara produktif. Dana-dana ini bisa berasal dari

⁵¹“Pengertian, Fungsi, Tugas Dan Tujuan Majelis-Majelis Serta Amal Usaha Di Dalam Muhammadiyah.”

individu, lembaga, perusahaan, atau instansi lain. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, LazisMu kemudian diakui oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Dengan adanya Undang-undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015, LazisMu kembali dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2016.⁵²

Latar belakang pendirian LazisMu didorong oleh dua faktor utama. Pertama, kenyataan bahwa Indonesia masih dilanda kemiskinan yang meluas, tingkat pendidikan yang rendah, serta indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Hal ini semua disebabkan oleh ketidakadilan sosial yang belum teratasi. Kedua, zakat dianggap sebagai alat yang efektif untuk mendorong tercapainya keadilan sosial, pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang sangat besar. Namun, potensi ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak memberikan dampak signifikan dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada. LazisMu didirikan dengan tujuan untuk menjadi lembaga pengelola zakat yang menggunakan manajemen modern, sehingga zakat dapat berfungsi sebagai solusi bagi masalah sosial yang terus berkembang. Dengan mengedepankan budaya kerja yang amanah, profesional, dan transparan, LazisMu berusaha membangun dirinya menjadi lembaga zakat yang terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat terhadap LazisMu semakin kuat. Dengan semangat kreativitas dan inovasi, LazisMu terus menciptakan program-program yang bermanfaat dan dapat menjawab tantangan perubahan sosial. Saat ini, LazisMu telah hadir hampir di seluruh Indonesia, memungkinkan program-programnya menjangkau berbagai wilayah dengan cepat, fokus, dan tepat sasaran.⁵³

⁵²“Latar Belakang | Lazismu,” accessed September 16, 2018, <https://www.lazismu.org/latarbelakang/>.

⁵³“Latar Belakang | Lazismu,” accessed September 16, 2018, <https://www.lazismu.org/latarbelakang/>.

Dalam periode 2015-2020, Majelis Pelayanan Sosial melalui LazisMu di Kota Palangka Raya telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Mengumpulkan, mensosialisasikan, dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada warga Kota Palangka Raya yang berhak menerimanya.
- b. Menyalurkan sekitar 50 paket sembako kepada korban banjir yang terjadi di Kota Palangka Raya.
- c. Memberikan paket Idul Fitri kepada kaum dhuafa yang ada di Kota Palangka Raya.
- d. Menyalurkan bantuan pendidikan untuk anak-anak kader Muhammadiyah yang kurang mampu, khususnya di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangka Raya.

MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) adalah lembaga kedua yang berada di bawah naungan Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah. Lembaga ini pertama kali dirintis pada tahun 2007 dengan nama "Pusat Penanggulangan Bencana." Kemudian, setelah Muktamar Muhammadiyah tahun 2010, lembaga ini resmi dikukuhkan menjadi organisasi yang bertugas untuk mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana. MDMC memiliki peran penting dalam respon terhadap bencana alam dan bantuan kemanusiaan, dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang dimiliki oleh Muhammadiyah.⁵⁵

MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) di Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana dan pelayanan sosial, antara lain:⁵⁶

- a. Berpartisipasi dalam penanggulangan banjir di Kota Palangka Raya dengan bekerja sama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Palangka Raya.

⁵⁴Apri Husin Rahu, Eksistensi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangka Raya, September 14, 2018.

⁵⁵"Profil MDMC," accessed September 16, 2018, <http://www.mdmc.or.id/index.php/profil-mdmc>.

⁵⁶Apri Husin Rahu, Eksistensi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangka Raya, September 14, 2018.

- b. Penyaluran paket sembako kepada warga yang terdampak banjir, sebagai bentuk bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- c. Pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai salah satu bentuk respons kemanusiaan terhadap dampak bencana.
- d. Pendampingan dan sosialisasi hidup sehat dan sanitasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di tengah kondisi pascabencana.

Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan komitmen MDMC dalam memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi bencana dan membantu masyarakat yang terdampak.

Demikian beberapa gerakan-gerakan tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya yang diadakan oleh 4 Majelis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Gerakan Tajdid merupakan sebuah gerakan yang dikembangkan oleh K.H. Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah dalam bentuk “Purifikasi dan Dinamisasi.” Purifikasi didasari oleh pandangan bahwa kemunduran umat Islam terjadi karena kurangnya pengembangan aqidah Islam yang benar, sehingga perlu dilakukan pemurnian dalam aspek aqidah dan ibadah dengan prinsip “segala sesuatu diyakini dan diterapkan apabila terdapat perintah dalam Al-Qur’an dan Hadits.” Sedangkan dinamisasi diterapkan dalam bidang muamalah, dengan menjalankan gerakan modernisasi selama tidak bertentangan dengan prinsip “semua tindakan dibolehkan selama tidak ada larangan atau tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits.”

Di Kota Palangka Raya, Pimpinan Daerah Muhammadiyah telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan Gerakan Tajdid, baik dalam bentuk Purifikasi maupun Dinamisasi. Purifikasi dilakukan oleh Majelis Tabligh melalui dakwah di berbagai masjid, seperti Masjid Mujahidin dan masjid lainnya yang menjadi binaan mereka. Sementara itu, Dinamisasi

terlihat dalam amal usaha Muhammadiyah yang meliputi sekolah dan lembaga-lembaga sosial yang berada di bawah pengelolaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangka Raya.

Daftar Pustaka

- AN., Firdaus. *Taqiyuddin Ibnu Taimiyah: Pokok-Pokok Pedoman Islam Dan Bernegara*. Bandung: Depongoro, 1967.
- Arifin, Syamsul. *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental*. Malang: UMM Press, 2005.
- Asyrofi, Yusron. *KH. Ahmad Dahlan, Pemikiran Dan Kepemimpinannya*. Yogyakarta: Ofset Yogyakarta, 1995.
- “Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.” Accessed September 13, 2018. <https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/11/01/592/jumlah-pemeluk-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2016.html>.
- Bakhri, Syaiful. “Menuju Revitalisasi Dan Transformasi Gerakan Pencerahan Muhammadiyah,” n.d.
- Bustamal, Aulia Rizki. “Pengaruh Perkembangan Kota Palangka Raya Terhadap Kawasan Tepi Sungai Kahayan.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Darban, Mustofa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby. *Muhamadiyah Sebagai Gerakan Islam Dalam Perspektif Historis Dan Idiologis*. Yogyakarta: LPPI, 2000.
- Djuanda. Kepengurusan Muhammadiyah era 1990-an, September 13, 2018.
- Haryanto, Joko. “Dinamika Kerukunan Intern Umat Islam Dalam Relasi Etnisitas Dan Agama Di Kalteng.” *Analisa* 20 (June 30, 2013): 13. doi:10.18784/analisa.v20i1.2.
- Hussein, Oemar Amin. *Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Indriyani, Dian. “Optimalisasi Fungsi Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Muhammadiyah Di Sekolah/Madrasah (Studi Kasus Di Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Selogiri Tahun 2014).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- “Ini Asal Muasal Baitul Arqam Dalam Pengkaderan Muhammadiyah | Pwmu.Co.” Accessed September 16, 2018. <https://pwmu.co/10751/06/20/ini-asal-muasal-baitul-arqam-dalam-pengkaderan-muhammadiyah/>.

- Iqbal. Dakwah Muhammadiyah Palangka Raya, September 20, 2018.
- Jayady, Mahsun. *Muhammadiyah Purifikasi Aqidah Dan Strategi Perjuangannya*. Surabaya: LP- AIK Univ. Muhammadiyah Surabaya, 1997.
- “Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Provinsi Kalimantan Tengah.” *Kumpulan Logo Lambang Indonesia*. Accessed September 10, 2018. http://ardilamadi.blogspot.com/2013/07/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di_7115.html.
- kalampangan, Diposting oleh sma muhammadiyah 2 palangkaraya di. “SMA MUHAMMADIYAH 2 PALANGKARAYA.” Accessed September 16, 2018. <http://smam2palangkaraya.blogspot.com/>.
- Kemuhammadiyah, TPA dan. *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran Dan Amal Usaha*. Yogyakarta: UMM, 1990.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- “Kota Palangka Raya.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 25, 2018. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Palangka_Raya&oldid=14135997.
- “Latar Belakang | Lazismu.” Accessed September 16, 2018. <https://www.lazismu.org/latarbelakang/>.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh, Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-a'lām*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. “Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Bab I Pasal 1 Ayat 3.” n.d.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI-Press, 1978.
- Notosusanto, Nugroho. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1978.
- “Pengertian, Fungsi, Tugas Dan Tujuan Majelis-Majelis Serta Amal Usaha Di Dalam Muhammadiyah.” *Pengertian, Fungsi, Tugas Dan Tujuan Majelis-Majelis Serta Amal Usaha Di Dalam Muhammadiyah*. Accessed September 16, 2018. <http://anakusniati.blogspot.com/2017/03/pengertian-fungsi-tugas-dan-tujuan.html>.
- “Profil MDMC.” Accessed September 16, 2018. <http://www.mdmc.or.id/index.php/profil-mdmc>.
- Qardlawi, Yusuf. *Dasar-Dasar Hukum Islam (Taqlid Dan Ijtihad)*, n.d.
- Rahman, Dudung Abdul al-. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Rahu, Apri Husin. Eksistensi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangka Raya, September 14, 2018.
- Rais, Amin. *Moralitas Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Dinamika, 1995.
- Setia, Deddy. *Gerakan Dakwah Purifikasi Muhammadiyah*. Jakarta: Jtpt IAIN, 2004.
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sugiatno. Amal Usaha Muhammadiyah, September 16, 2018.
- “Suku Dayak Bakumpai.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, February 13, 2017.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Dayak_Bakumpai&oldid=12500355.
- Surakhmad, Wiranto. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode, Dasar, Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.